



Kota Pontianak Pertahankan Opini WTP

Hasil Audit BPK RI terhadap LKPD 2012

PONTIANAK - Pemerintah Kota Pontianak patut diacungi jempol. Pasalnya, kali kedua pemerintahan yang dipimpin Sutarmidji itu meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI. Opini

tersebut sekaligus mempertahankan predikat tahun lalu.

Opini WTP merupakan penilaian tertinggi yang diberikan oleh BPK RI berdasarkan hasil audit terhadap laporan keuangan Pemerintah Kota Pontianak tahun 2012. Opini ini diserahkan oleh Kepala BPK RI Perwakilan Kalimantan Barat, Adi Sudibyo kepada

◆ Ke Halaman 7 kolom 5

Kota Pontianak Pertahankan Opini WTP

Sambungan dari halaman 1

Wali Kota Pontianak, Sutarmidji di Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Kalbar, Jumat (31/5).

Dalam sambutannya, Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Kalbar, Adi Sudibyo, menyatakan bahwa opini yang diberikan merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran atas penyajian laporan keuangan (LK) yang didasarkan pada kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan (SAP), kecukupan pengungkapan (*adequate disclosure*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta efektivitas sistem pengendalian intern (SPI).

"Berdasarkan kriteria tersebut, BPK RI menyatakan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelasan (WTP DPP) atas LK Pemerintah Kota Pontianak dan Wajar

Dengan Pengecualian (WDP) atas LK Kabupaten Pontianak," paparnya.

Dalam paragraf penjelasan, ada beberapa hal yang menjadi catatan dalam laporan keuangan Kota Pontianak. Antara lain, pengelolaan aset tetap Pemkot Pontianak tahun anggaran 2012 belum dilakukan secara memadai dan perolehan aset dari dana belanja operasional sekolah belum dicatat dalam neraca dan belum diadministrasikan secara memadai.

Wali Kota Pontianak, Sutarmidji, mengatakan bahwa opini WTP tidak terlepas dari kinerja seluruh jajaran Pemkot Pontianak. Namun, kata dia, tidak boleh terlalu puas, sebaiknya terus melakukan perbaikan.

Mengenai catatan yang diberikan BPK, Sutarmidji tidak membantah hal tersebut. "Temuannya tetap ada, tetapi tidak fatal, tidak mengarah pada kerugian

negara. Hanya administrasi. Ada hal yang aturannya belum ada, tetapi kita harus tangani. Tetapi dari indikasi penyelewengan tidak ada. Anggaran kita ketat," ujarnya.

Penyerahan opini BPK RI terhadap laporan keuangan pemerintah daerah baru dilakukan kepada Kota Pontianak dan Kabupaten Pontianak. Kabupaten Pontianak mendapatkan wajar dengan pengecualian (WDP). Sutarmidji berharap daerah lain di provinsi ini ada juga yang mendapat WTP. "Karena merupakan suatu kebanggaan bagi daerah kita dikenal dengan penilaian tertinggi," ungkapnya.

Saat ini sudah banyak pemerintah kabupaten/kota yang datang ke Kota Pontianak untuk studi banding terkait keberhasilan Pemkot Pontianak meraih predikat opini WTP. "Sudah banyak yang datang studi banding," ucap Sutarmidji. (*hen/**)